

# SUKSES TES PERANGKAT DESA

PENGETAHUAN UMUM & PEMERINTAHAN DESA

100 Soal + Kunci Jawaban



[SUBSCRIBES](#)

[PROPERTY BY TIPS & TRICK BELAJAR PERANGKAT DESA](#)

1. Tanggal 28 oktober merupakan hari.....
  - a. Hari Batik
  - b. Hari Sumpah Pemuda**
  - c. Hari Pahlawan
  - d. Hari Nasional
  - e. Jawaban a, b, c dan d salah semua
2. Siapakah yang menciptakan lagu Satu Nusa Satu Bangsa.....
  - a. W.R. Supratman
  - b. Ismail Marzuki
  - c. Kusbini
  - d. Liberty Manik**
  - e. Ibu Sud
3. Perangkat desa yang bertugas tentang pertanahan adalah....
  - a. Kades
  - b. Sekdes
  - c. Kasi Pemerintahan**
  - d. Kaur Keuangan
  - e. Kasi Pelayanan
4. Ir.Soekarno dalam sidang BPUPKI pertama, mengusulkan rumusan Pancasila yaitu ....
  - a. Nasionalisme internasional (peri kemanusiaan), mufakat, kesejahteraan sosial dan
  - b. Nasionalisme, Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan Indonesia,
  - c. Kesejahteraan sosial, internasionalisme, nasionalisme, peri kemanusiaan dan Ketuhanan
  - d. Internasionalisme, nasionalisme, mufakat, demokrasi dan Ketuhanan
  - e. Gotong royong, Ketuhanan, kerakyatan, nasionalisme dan demokrasi**
5. Norma pertama dalam tata hukum Indonesia adalah ...
  - a. Dekrit Presiden
  - b. Proklamasi Kemerdekaan
  - c. Ketetapan MPR
  - d. Pembukaan UUD 1945**
  - e. Pancasila
6. Hubungan antara pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan adalah ...
  - a. Pancasila memberi motivasi perjuangan kemerdekaan
  - b. Pancasila menjadi dasar perumusan Teks Proklamasi
  - c. Teks Proklamasi dirumuskan bersamaan dengan Pancasila
  - d. Proklamasi Kemerdekaan menjadi dasar berlakunya Pancasila**
  - e. Nilai Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan adalah sama
7. Menurut Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan pertama, dalam hal memberi grasi dan rehabilitasi, Presiden perlu memperhatikan pertimbangan dari ....
  - a. MPR
  - b. Dewan Perwakilan Rakyat
  - c. Mahkamah Agung**
  - d. Menteri Kehakiman
  - e. Dewan Pertimbangan Agung
8. Desentralisasi sebagai salah satu asas yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah maknanya adalah ....
  - a. Penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu
  - b. Penyerahan kewenangan kepada derah untuk mengurus rumah tangganya sendiri
  - c. Pendeklegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah**

- d. Pelimpahan tugas kepada daerah untuk mengurus dan melaksanakan pemerintahan
  - e. Pembagian tugas pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
9. Cita-cita nasional bangsa Indonesia yang memberi corak kepada politik luar negeri Indoensia yang bebas dan aktif tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu ..
- a. Menjaga keteriban dunia
  - b. Mengirimkan pasukan kewilayah konflik
  - c. Menentang penyerangan sepihak oleh AS
  - d. Mendukung penyelenggaraan hubungan bilateral
  - e. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa**
10. Contoh pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan Pancasila adalah ...
- a. Ikut campur dan memihak salah satu blok
  - b. Pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik**
  - c. Memberi bantuan senjata kepada negara yang bertikai
  - d. Menghimpun negara sepaham dan seidologi
  - e. Organisasi ekonomi yang eropa sentris
11. Fungsi filsafat Pancasila dalam hubungan dengan ideologi-ideologi di dunia adalah sebagai ....
- a. Perbandingan perkembangan ideologi
  - b. Penyaringan masuknya ideologi asing**
  - c. Perpaduan filsafat dan ideologi
  - d. Perebutan hegemoni filsafat
  - e. Unsur ideologi setiap bangsa
12. Dilihat dari segi tujuannya, negara kepolisian bertujuan ...
- a. Meningkatkan kesejahteraan
  - b. Mewujudkan ketertiban**
  - c. Memelihara kekuasaan
  - d. Menjamin keamanan
  - e. Mempertahankan persatuan
13. Apabila didasarkan pada ajaran Trias Politika, yang dikenal dengan teori pemisahan kekuasaan negara, maka penetapan APBN menurut UUD 1945 merupakan campur tangan...
- a. Presiden dalam kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat**
  - b. Dewan Perwakilan Rakyat dalam kekuasaan presiden
  - c. Presiden dalam kekuasaan Mahkamah Agung
  - d. Mahkamah Agung dalam kekuasaan Presiden
  - e. DPR dalam kekuasaan Mahkamah Agung
14. Jika dibandingkan dengan kabinet parlementer kelebihan kabinet presidential adalah dalam hal...
- a. Pembentukan kabinet sangat demokratis
  - b. Jalannya pemerintahan lebih setabil**
  - c. Para menteri bertanggung jawab secara kolektif
  - d. Para menteri dapat diganti sewaktu-waktu
  - e. Pemerintahan lebih mencerminkan aspirasi rakyat
15. Dibandingkan dengan berbagai norma sosial lainnya, sanksi norma kesopanan bersumber dari ...
- a. Hati nurani**
  - b. Masyarakat
  - c. Tuhan
  - d. Lembaga sosial
  - e. Negara
16. Salah satu hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat menurut Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah adalah ...
- a. Industri dan perdagangan
  - b. Penanaman modal

- c. Pemberdayaan sumber daya alam
  - d. Pekerjaan umum
  - e. Pendidikan dan kebudayaan
17. Pancasila sebagai *way of life* dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dalam hal ini Pancasila memiliki makna sebagai.....
- a. Kristalisasi nilai
  - b. Ciri-ciri warga negara
  - c. Kepribadian bangsa
  - d. Karakteristik bangsa
  - e. **Pedoman hidup**
18. Pancasila tidak mengenal adanya fasisme sebab fasisme bertitik tolak pada „„,
- a. Pemusatan kekuasaan pada beberapa orang
  - b. **Mengutamakan individualisme radikal**
  - c. Material modern dan individualisme
  - d. Pemusatan kekuasaan pada satu orang
  - e. Memaksakan praktek liberalisme
19. Upaya pendidikan politik secara intensif dan komprehensif dilakukan terutama untuk ....
- a. Mewujudkan kesatuan dalam berpolitik
  - b. Mencegah masuknya budaya politik asing
  - c. Meningkatkan peran berbagai lembaga negara
  - d. **Mengembangkan budaya politik yang demokratis**
  - e. Menghindari perbedaan pandangan politik yang tajam
20. Fungsi pembukaan UUD 1945 alinea IV, yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi....
- a. Filter bagi masuknya budaya asing
  - b. Sumber budaya bangsa
  - c. Petunjuk pelaksanaan peraturan
  - d. Sumber hukum yang berlaku
  - e. **Ciri dan karakteristik bangsa**
21. Jatuhnya kerajaan-kerajaan besar di Indonesia seperti Gowa, Mataram, Banten, dan Aceh yang berlangsung dari sekitar 1680 hingga 1750 ke tangan Belanda menandai awal dari...
- a. Hancurnya perdagangan rempah-rempah
  - b. Mulai terciptanya kesatuan wilayah di Indonesia
  - c. Pendidikan barat masuk ke Indonesia
  - d. **Munculnya perlawanan terhadap kekuasaan Belanda**
  - e. Berakhirnya pengaruh Portugis di Indonesia
22. Setelah Indonesia merdeka dan memperoleh pengakuan internasional, ternyata masalah-masalah yang dihadapi belum berakhir, terutama masalah konstitusi. Pada tahun 1950, setelah terbentuk negara kesatuan, UUD Sementara yang digunakan pada hakikatnya merupakan UUD ...
- a. **Hindia Belanda dengan beberapa perubahan**
  - b. Negara Indonesia Timur dengan beberapa perubahan
  - c. 1945 yang disempurnakan
  - d. RIS dengan beberapa perubahan
  - e. Baru yang direncanakan KNI
23. Rencana pembangunan tahunan merupakan bentuk rinci dari ....

- a. Propenas
  - b. APBN
  - c. Repelita
  - d. RAPBN**
  - e. RAPBD
24. Hutan Indonesia dikhawatirkan akan semakin mengalami kerusakan parah terutama karena ulah pemegang HPH, penebangan liar, dan karena ...
- a. Permintaan pabrik kertas
  - b. Meningkatnya industri tripleks
  - c. Terjadinya penyelundupan
  - d. Kemarau panjang
  - e. Kebakaran hutan**
25. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia mengalami perubahan substansial, yakni TNI sebagai kekuatan pertahanan negara, sedangkan Polri sebagai kekuatan dengan fungsi ...
- a. Sosial kemasyarakatan
  - b. Menjaga hukum dan keadilan
  - c. Pengendalian mumum
  - d. Keamanan dan ketertiban masyarakat**
  - e. Penyidikan dan keamanan publik
26. Arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi antara lain menghindari terjadi struktur pasar monopolistik, karena hal ini sangat merugikan bagi ....
- a. Pertumbuhan usaha koperasi
  - b. Perkembangan usaha pertanian
  - c. Terwujudnya persaingan sehat**
  - d. Perkembangan dunia industri
  - e. Peningkatan pendapatan pajak
27. Kemajuan komunikasi yang canggih sebagai hasil kemajuan iptek telah meningkatkan konsumerisme melalui ...
- a. Sinetron
  - b. Penawaran barang mewah
  - c. Iklan dalam media elektronik**
  - d. Film
  - e. Kuis
28. Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, politik,hukum, keagamaan, adat,swadaya masyarakat merupakan amanat GBHN secara umum pada bidang ....
- a. Pembangunan daerah
  - b. Pembangunan nasional
  - c. Pengembangan pemerintah pusat
  - d. Pengembangan pemerintah daerah**
  - e. Kesetaraan anata pusat dan daerah
29. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat, menurut UUD 1945, kuat karena
- a. Berhak menentapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**
  - b. Seluruh anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR
  - c. Setiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR
  - d. Merupakan mitra Presiden di bidang legislatif
  - e. Turut serta meratifikasi perjanjian internasional
30. Salah satu perbedaan prinsipil antara orde reformasi dengan orde sebelumnya adalah ....
- a. DPR bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam setahun
  - b. Aspirasi rakyat langsung dapat disampaikan**

- c. Presiden dibantu oleh badan nondepartemen
  - d. Presiden dibantu oleh menteri negara
  - e. DPR dan MPR bersifat dua kamar
31. Pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia selama Orde Baru memiliki asas langsung, umum, bebas dan rahasia, sedangkan pada masa reformasi (pemilu 1999) termasuk juga asas
- a. Kebesamaan
  - b. Semua untuk semua
  - c. Efektif dan efisien
  - d. Jujur dan adil**
  - e. Bertanggung jawab
32. Penyelenggaraan pemerintah dengan otonomi berdasarkan pada asas ...
- a. Dekonsentrasi
  - b. Desentralisasi**
  - c. Medebewin
  - d. Sentralisasi
  - e. konsentrasi
33. Jakarta merupakan suatu Daerah Khusus Ibu Kota dengan penataan pemerintahannya secara khusus karena memiliki kekhususan, antara lain sebagai ....
- a. Pusat pemerintahan negara**
  - b. Pusat industri tinggi
  - c. Kota yang paling tua
  - d. Daerah tujuan wisata
  - e. Kota modern
34. Pada amandemen keempat UUD 1945, pasal 29, telah disepakati ...
- a. Penjelasan lebih rinci
  - b. Adanya penambahan ayat
  - c. Perubahan hanya pada ayat (1)**
  - d. Perubahan hanya pada ayat (2)
  - e. Telah mengambil perubahan
35. Dunia Melayu, yaitu Riau, Malaka, dan daerah sekitarnya sangat beruntung dilihat dari sudut internasional karena....
- a. Letak geografis yang dipengaruhi angin musim
  - b. Tedapat beberapa keseltanan di kedua tepi Selat Malaka
  - c. Penggunaan mata uang yang sama
  - d. Agama yang sama
  - e. Penggunaan bahasa yang sama**
36. Kedatangan bangsa-bangsa baik dari Asia Barat, Asia Selatan maupun Asia Timur ke Kepulauan Indonesia sejak abad X adalah karena antara lain lada yang dihasilkan di Sumatera dan Jawa Barat, juga di ....
- a. Jawa Tengah
  - b. Kalimantan Selatan
  - c. Kalimantan Timur
  - d. Jawa Timur
  - e. Sulawesi Selatan**
37. Pemberdayaan ekonomi rakyat sangat terkait dengan upaya menggerakkan perekonomian pedesaan karena alasan-alasan berikut, KECUALI...
- a. Sebagian besar rakyat pedesaan hidup miskin
  - b. Wilayah negeri ini sebagian besar adalah pedesaan
  - c. Pedesaan kaya dengan potensi yang dapat dikembangkan
  - d. Rakyat di pedesaan menuntut demokratisasi ekonomi**

- e. Pembangunan pedesaan dapat menghemat arus urbanisasi
38. Berdasarkan UUD 1945, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh ....
- a. Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR
  - b. DPR dengan memperhatikan usul dari pemerintah
  - c. Presiden dengan memperhatikan pendapat DPD
  - d. DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD**
  - e. Presiden dengan memperhatikan perimbangan DPD
39. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut UUD 1945 mempunyai hak interpelasi, yakni hak untuk ....
- a. Bertanya kepada Pemerintah**
  - b. Melakukan penyelidikan
  - c. Melakukan perubahan terhadap RUU
  - d. Mengawasi jalannya pemerintahan
  - e. Ikut serta menetapkan APBN
40. Berdasarkan UUD 1945, Mahkamah Agung hanya mempunyai hak menguji formal terhadap peraturan perundang-undangan yang berupa ....
- a. Undang-undang
  - b. Peraturan pemerintah
  - c. Keputusan presiden**
  - d. Keputusan menteri
  - e. Peraturan daerah
41. Pancasila menjadi azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap warga negara hendaknya....
- a. Memahami Pancasila sebagai sumber hukum
  - b. Memahami Pancasila sebagai dasar negara
  - c. Berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila**
  - d. Berupaya selalu mempelajari Pancasila
  - e. Mempelajari hakikat dari Pancasila
42. Keunggulan demokrasi Pancasila dalam setiap pengambil keputusan ialah...
- a. Hasil keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan
  - b. Kepentingan tiap individu didahulukan
  - c. Pengambil keputusan oleh pimpinan rapat
  - d. Keputusan diambil melalui musyawarah mufakat**
  - e. Masalah harus diselesaikan dengan hati-hati
43. Manakah pernyataan dibawah ini yang sesuai dengan sila ke-2 Pancasila?
- a. Kaum pria memiliki derajat yang lebih tinggi.
  - b. Pemimpin dan pemuka masyarakat berkedudukan lebih tinggi.
  - c. Manusia mempunyai derajat dan martabat yang sama.**
  - d. Kedudukan seseorang ditentukan oleh yang dimilikinya.
  - e. Kedudukan seseorang ditentukan oleh perbuatannya.
44. Mana yang terkandung pada nilai patriotisme dalam kehidupan berbangsa adalah....
- a. Selalu berjuang untuk kepentingan negara
  - b. Selalu menentang pada negara penjajah**
  - c. Rela berkorban untuk kepentingan keluarga
  - d. Selalu mengupayakan persatuan bangsa
  - e. Mau menyumbangkan harta untuk masyarakat
45. Suasana kebatinan atau cita-cita hukum dasar negara RI terangkum dalam ...
- a. Pidato kenegaraan Presiden menjelang 17 Agustus
  - b. Berbagai konvensi dan jurisprudensi yang berlaku
  - c. Peraturan perundang-undangan yang telah berlaku
  - d. Empat pokok pikiran Pembukaan UUD 1945**

- e. Ketetapan dan keputusan MPR/MPRS
46. Di Pembukaan UUD 1945 tercantum tujuan negara, yaitu “ .....*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ...*” Hal ini menunjukkan bangsa Indonesia menganut sistem dalam arti .....
- Negara hukum demokrasi**
  - Negara kepolisian dan jaksa
  - Negara hukum kesejahteraan
  - Begara sebagai penjaga malam
  - Negara hukum dalam arti terbatas
47. Rempah-rempah yang sulit diperoleh di Eropa pada abad ke-15, ke-16, dan ke-17 membuat orang-orang Eropa ingin membelinya sendiri dari tempat-tempat penghasilannya. Hal ini menimbulkan persaingan antara orang-orang Eropa sendiri antara lain yang terjadi di Banten antara orang-orang Belanda dan ....
- Orang-orang Spanyol
  - Orang-orang Portugis**
  - Orang-orang Perancis
  - Orang-orang Italia
  - Orang-orang Inggris
48. Pemerintah telah menetapkan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Yang dimaksud pendidikan dasar 9 tahun adalah ....
- Pendidikan yang terdiri dari prasekolah, SD, dan SLTP**
  - Pendidikan tingkat SLTP 3 tahun yang dihapus dan diintegrasikan menjadi SD tahun
  - Pendidikan tingkat SD 6 tahun dan SLTP 3 tahun
  - Pendidikan pada tingkat SD yang diperpanjang menjadi 9 tahun
  - Pendidikan SD dan SLTP yang sama-sama menjadi 9 tahun
49. Untuk menanggulangi banyaknya tenaga kerja yang menganggur dan setengah menganggur, salah satu jalan keluarnya ialah dengan ....
- Memperbaiki sektor industri
  - Memperluas kesempatan kerja**
  - Memperluas pendidikan
  - Manfaatkan sumber daya alam
  - Meminta bantuan luar negeri
50. Sasaran perbaikan struktur politik yang demokratis pada intinya ialah adanya keseimbangan, adanya peningkatan kinerja lembaga-lembaga negara, serta adanya ...
- Pemisahan kekuasaan secara tegas**
  - Pengawasan yang ketat
  - Kebebasan pers
  - Kemauan pimpinan nasional
  - Dominasi partai politik
51. Hak yang didapatkan oleh kepala desa yang berstatus PNS adalah seperti dibawah ini kecuali:
- Penghasilan Tetap**
  - Tunjangan Kesejahteraan
  - Tambahan Tunjangan
  - Penghasilan lainnya yang sah
  - Penghasilan Pokok
52. Pencatatan aset desa yang termasuk KIB B yaitu :
- Jalan Betonisasi
  - Tanah Bengkok dan bondo desa

- c. Komputer dan laptop
  - d. Sambungan listrik atau telepon
  - e. Balai Desa
53. Penandatangan SPJ Barang ditanda tangani oleh :
- a. BPD dan kades
  - b. Kades dan Sekdes
  - c. **Kades dan pengurus barang**
  - d. Sekdes dan pengurus Barang
  - e. Pengurus Barang
54. Yang bukan merupakan sumber pendapatan Desa adalah:
- a. pendapatan asli desa
  - b. **Pajak Bumi dan Bangunan**
  - c. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten
  - d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
  - e. Retribusi Pasar Desa
55. Sesuai dengan pasal 100 PP 43 tahun 2014 Bahwa maksimal 30% dari anggaran belanja Desa digunakan untuk, Kecuali:
- a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa.
  - b. **Tambahan Tunjangan Pemerintah Desa**
  - c. operasional Pemerintah Desa.
  - d. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa
  - e. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
56. Rancangan APB Desa dibuat oleh Kepala Desa Bersama dengan BPD dan diverifikasi Oleh :
- a. Bupati
  - b. **Camat atas nama Bupati**
  - c. Bagian pemerintahan Desa
  - d. Bapermades kabupaten
  - e. Provinsi
57. Kepala Desa melaporkan realisasi Anggaran APBDesa kepada Bupati setiap :
- a. Bulan
  - b. Triwulan
  - c. Semester
  - d. **Tahun**
  - e. Akhir masa jabatan
58. Besaran Prosentase maksimal penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menurut PP 47 tahun 2015 bagi ADD yang kurang dari 500 Juta adalah sebesar :
- a. **60% dari total ADD**
  - b. 50% dari total ADD
  - c. 40% dari Total ADD
  - d. 40% dari total APBDes
  - e. 30% dari total APBDes
59. Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling lama adalah selama :
- a. 35 Tahun
  - b. **20 Tahun**

- c. 10 Tahun
  - d. 5 Tahun
  - e. 1 Tahun
60. Yang tidak termasuk dalam Klasifikasi Belanja Desa adalah :
- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa
  - b. pelaksanaan pembangunan Desa
  - c. pelayanan masyarakat Desa**
  - d. pembinaan kemasyarakatan Desa
  - e. pemberdayaan masyarakat Desa
61. yang termasuk dalam jenis kegiatan yang masuk dalam Program penyeleenggaraan Pemerintahan Desa adalah :
- a. Operasional LPMD
  - b. Operasional KPMD
  - c. Operasional RT/RW**
  - d. Operasional PKK
  - e. Operasional karang taruna
62. Yang tidak termasuk dalam Hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara dan Surat Perjanjian kerjasama antara Ketua TPK dengan penyedia barang/jasa yang berisi sekurang-kurangnya:
- a. para pihak
  - b. ruang lingkup pekerjaan dn nilai Pekerjaan
  - c. Perhitungan Pengembalian sisa anggaran ke desa**
  - d. hak dan kewajiban para pihak
  - e. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
63. Dana cadangan dapat dilakukan oleh desa dengan ditetapkan dengan :
- a. Peraturan Daerah
  - b. Perataran Bupati
  - c. Peraturan Desa**
  - d. Peraturan Kepala Desa
  - e. Keputusan Kepala Desa
64. Bukti Pengeluaran belanja Desa harus mendapatkan pengesahan dari
- a. Kepala Desa
  - b. Sekretaris Desa**
  - c. Bendahara Desa
  - d. Pelaksana Kegiatan
  - e. BPD
65. Pengeluaran belanja tidak dapat dikeluarkan sebelum APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa kecuali belanja yang bersifat wajib dan belanja yang besifat mengikat. Salah satu belanja yang bersifat mengikat adalah :
- a. Belanja Honorarium pembangunan
  - b. Belanja Pembelian bahan bangunan
  - c. Belanja pembayaran Listrik**
  - d. Belanja Perjalanan Dinas
  - e. Belanja makan dan minum rapat

66. Pengeluaran belanja desa yang wajib dilaksanakan dengan transfer paling sedikit adalah sebesar :
- Rp. 1.000.000,-
  - Rp. 3.000.000,-
  - Rp. 5.000.000,-**
  - Rp. 10.000.000,-
  - Rp. 25.000.000,-
67. Perencanaan aset desa dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan selama :
- 5 Tahun
  - 6 Tahun**
  - 7 Tahun
  - 8 Tahun
  - 1 Tahun
68. Bentuk pemanfaatan aset desa seperti dibawah ini Kecuali :
- Sewa
  - Pinjam Pakai
  - Penjualan**
  - Kerja sama Pemanfaatan
  - Bangun serah guna dan bangun guna serah
69. Pencatatan dan pembukuan dalam penatausahaan Keuangan menggunakan buku-buku dibawah ini kecuali :
- buku kas umum
  - Buku Kas khusus**
  - buku kas pembantu pajak
  - buku bank
  - buku bantu penerimaan dan pengeluaran
70. Yang tidak masuk dalam Pendapatan Desa dalam Penjabaran APB Desa adalah :
- bantuan Keuangan dari APBN
  - Hibah uang dari Perseorangan
  - Hasil Penjualan Bengkok Perangkat Desa
  - Hasil Sewa lapangan Desa
  - Bantuan barang secara swadaya dan gotong royong masyarakat**
71. UU tentang desa adalah:
- No. 10 Tahun 2014
  - No. 11 Tahun 2014
  - No. 20 Tahun 2014
  - No.6 Tahun 2014**
  - No. 22 Tahun 2014
72. Yang tidak termasuk dalam pengadaan barang dan jasa desa adalah :
- Pembelian Kendaraan Bermotor
  - Pebelian mebelair
  - Pembelian tanah**
  - Pembelian televisi
  - Cetak buku

73. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2016 mengatur tentang
- Keuangan desa
  - Kewenangan Desa
  - Aset Desa**
  - Kewajiban Desa
  - Pilkades
74. pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa adalah :
- Kepala Desa**
  - BPD
  - Sekretaris Desa
  - Kaur Umum
  - Kepala desa Bersama BPD
75. Yang bertugas dalam Pengadministrasian Aset didesa adalah tugas dari :
- Kepala desa
  - Sekdes
  - Kaur Keuangan
  - Kaur Tata usaha dan Umum**
  - Kasi Pemerintahan
76. Pembantu Pengelola Aset yang ada di desa adalah :
- Sekretaris Desa**
  - Kaur tata usaha dan Umum
  - Kaur Perencanaan
  - Masing-masing kasi
  - Kepala Dusun
77. Penjabaran Program Kegiatan dalam APBDes diperinci dalam Jenis belanja dan mencantumkan nama dan nilai barang yang dirangkum dalam :
- RAB APB Desa**
  - Dokumen APB Desa
  - Perincian APB Desa
  - Nota Desa
  - Buku APB Desa
78. Yang Bukan merupakan pendapatan desa yang berasal dari dana transfer adalah
- dana Desa
  - bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah
  - alokasi dana Desa
  - bantuan keuangan dari APBD dan APBN
  - bantuan keuangan dari pihak ketiga**
79. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dalam APBDes masuk dalam program :
- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**
  - Pembangunan Desa
  - Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - Pembinaan Kemasyarakatan

- e. Belanja Tidak Terduga
80. Yang bukan merupakan Jenis belanja Barang/Jasa adalah :
- a. belanja bahan/material;
  - b. belanja jasa kantor;
  - c. belanja premi asuransi
  - d. belanja Pembelian kendaraan Bermotor**
  - e. belanja perawatan kendaraan bermotor
81. yang termasuk bahan habis pakai dalam jenis belanja barang/jasa adalah
- a. Belanja air
  - b. Belanja surat kabar
  - c. Belanja bahan Baku bangunan
  - d. Belanja bahan bakar minyak/Gas**
  - e. Belanja penggantian suku Cadang
82. Kelompok belanja tidak terduga digunakan untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa, yang penetapanya dilakukan oleh :
- a. Kepala Desa
  - b. BPD
  - c. Camat
  - d. Bupati**
  - e. Masyarakat
83. Pembentukan Dana cadangan dapat dianggarkan dan dimasukkan di APB Desa pada Kode Rekening :
- a. Pendapatan Desa
  - b. Belanja Desa
  - c. Penerimaan Pembiayaan
  - d. Pengeluaran Pembiayaan**
  - e. Kegiatan Pemerintahan Desa
84. Jumlah keanggotaan TPK masing-masing desa adalah berjumlah maksimal ..... Orang
- a. 10
  - b. 12
  - c. 14**
  - d. 16
  - e. 18
85. Tugas Pokok Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dalam pengadaan barang dan jasa adalah :
- a. memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan pembayaran dari TPK
  - b. mengembalikan dokumen pendukung kepada TPK apabila bukti tersebut belum memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap
  - c. mengawasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa**
  - d. menyampaikan hasil verifikasi atas dokumen permohonan pembayaran kepada bendahara desa
  - e. menyimpan seluruh dokumen Pengadaan Barang/Jasa

86. Melakukan survey lapangan, membuat gambar desain dan RAB dan menyusun kebutuhan bahan/alat/tenaga kerja adalah tugas dari :
- Ketua TPK
  - Sekretaris TPK
  - Panitia Perencana**
  - Panitia Pengadaan
  - Panitia Penerima Hasil
87. Panitia Pelaksana melaksanakan pekerjaan yang telah disusun perencanaannya kecuali:
- melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa**
  - Melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan
  - Mengajukan kebutuhan bahan dan jasa lainnya
  - Mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli perseorangan
  - Melaksanakan pekerjaan secara swakelola
88. Pembayaran pengadaan barang/ jasa dilaksanakan Oleh
- Kepala Desa
  - Ketua TPK
  - Bendahara TPK
  - Bendahara Desa**
  - Panitia Pengadaan
89. Jumlah tim penyusun RPJMDes paling sedikit sebanyak :
- 5 Orang
  - 7 Orang**
  - 9 orang
  - 11 orang
  - 13 orang
90. Tim penyusun RPJM Desa mempunyai tugas seperti dibawah ini Keecuali:
- Menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten
  - Melakukan PKD
  - Melakukan penyusunan rancangan RPJM Desa
  - Melakukan penyempurnaan rancangan RPJM Desa
  - Menentukan RKPPDes**
91. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa dengan mengintegrasikan rencana pembangunan desa sekurang-kurangnya terhadap hal-hal dibawah ini kecuali :
- RPJMD Kabupaten
  - Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
  - APBDes**
  - Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten
  - Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten
92. RPJMDes ditetapkan desa dalam bentuk :
- Peraturan Desa**
  - Peraturan Kepala Desa
  - Peraturan Bersama Kepala Desa
  - Keputusan Kepala Desa
  - APBDes

93. Tujuan disusunnya RKP Desa:
- Membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan tingkat desa yang akan menjadi prioritas pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Desa**
  - Menjamin pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat
  - Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran
  - Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa
  - Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa
94. Penyusunan Rancangan RKP Desa dilakukan oleh Tim Penyusun berpedoman pada
- hasil kesepakatan musyawarah Desa
  - pagu indikatif Desa
  - pendapatan asli Desa
  - rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten
  - masukan kepala desa**
95. Tunjangan Kesehatan diberikan kepada :
- Perangkat Saja
  - Perangkat beserta istri/suami saja
  - Perangkat, istri/suami dan anak**
  - Perangkat, orang tua, istri/suami dan anak
  - Perangkat dan selingkuhannya
96. Besaran Bengkok yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam :
- Peraturan desa**
  - Keputusan Kepala Desa
  - Peraturan Kepala Desa
  - APBDes
  - RPJMDes
97. Kode rekening untuk pembiayaan sesuai PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 adalah..
- 1
  - 2
  - 3**
  - 4
  - 5
98. Belanja modal yang berupa pembangunan fisik berupa rabat beton, pengaspalan jalan, kaur umum memasukkan pencatatan aset tersebut dalam golongan KIB :
- A
  - B
  - C
  - D**
  - E

99. Dalam Pelaksanaan Pembangunan tetapi baru dapat dikerjakan 50% maka pencatatan aset masuk dalam golongan KIB :

- a. B
- b. C
- c. D
- d. E
- e. F

100. Pembuatan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) barang yang dilaporkan Kepada Kepala desa setiap :

- a. Perbulan
- b. Triwulan
- c. Caturwulan
- d. Semester
- e. Setahun